



RENCANA  
KINERJA  
TAHUNAN 2020

DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenaan-Nya jua, kami Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dapat melakukan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2020.

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan melalui Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini akan melaksanakan segenap program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk periode 2020 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sesuai visi dan misinya.

Dalam rangka melaksanakan mandat tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2020 sebagai wujud implementasi transparansi segenap program dan kegiatan yang termuat sebelumnya pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021.

Kepala Dinas Kesehatan  
  
Andi Sri Juliarty  
19680711 199806 2 001



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak dalam kandungan sampai usia lanjut. Selain itu pembangunan bidang kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu lembaga pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dalam kerangka desentralisasi pembangunan bidang kesehatan ditujukan untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang kesehatan yang berlandaskan prakarsa dan aspirasi masyarakat dengan cara memberdayakan, menghimpun dan mengoptimalkan potensi daerah untuk kepentingan daerah dan prioritas Nasional dalam mencapai pembangunan kesehatan jangka menengah tahun 2020 dan jangka panjang pada tahun 2025.

Pembangunan kesehatan pada periode 2016 - 2021 adalah dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud status kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Untuk dapat meningkatkan daya tangkal dan daya juang pembangunan kesehatan yang merupakan modal utama pembangunan nasional, tinjauan kembali terhadap kebijakan pembangunan kesehatan merupakan suatu keharusan. Perubahan pemahaman akan konsep sehat – sakit serta makin kayanya khasanah ilmu pengetahuan dengan informasi tentang determinan penyebab penyakit yang multifaktorial, telah menggeser paradigma

pembangunan kesehatan yang lebih mengutamakan pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Program Indonesia Sehat dilakukan dengan 3 pilar utama yakni :

*Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional*, dapat dijelaskan :

1. *Pilar Paradigma Sehat* dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif dan preventif serta pemberdayaan masyarakat
2. *Penguatan Pelayanan Kesehatan* dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggerakkan continuum of care dan intervensi berbasis resiko kesehatan
3. *Jaminan Kesehatan Nasional* dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya

Selain hal – hal di atas, berbagai perubahan dan perkembangan dalam skala luas turut mempengaruhi perubahan arah pembangunan kesehatan di masa yang akan datang, antara lain :

1. Perubahan – perubahan mendasar pada dinamika kependudukan yang mendorong lahirnya transisi demografis dan epidemiologis
2. Temuan – temuan substantif dalam ilmu dan teknologi kedokteran yang semakin membuka cakrawala baru dalam memandang proses hidup sehat, sakit dan mati
3. Tantangan global sebagai akibat kebijakan perdagangan bebas, serta pesatnya revolusi dalam bidang informasi, telekomunikasi dan transportasi
4. Perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap derajat dan upaya kesehatan
5. Demokratisasi di segala bidang yang menuntut pemberdayaan dan kemitraan dalam pembangunan kesehatan

6. Jaminan Kesehatan Nasional dengan sasaran semua penduduk mendapat Jaminan Kesehatan (Total Coverage) pada tahun 2019.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2021, yang salah satu misinya adalah meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia yang beriman, dimana tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memfokuskan sasaran meningkatnya status kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan serta meningkatnya mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat termasuk masyarakat miskin, maka dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Pentingnya peran aktif tim kerja di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sangat dibutuhkan sebagai langkah dalam rangka pencapaian segenap indikator kinerja yang telah termuat dalam perjanjian kinerja. Program-program pembangunan kesehatan yang akan diselenggarakan diarahkan untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan program-program inovatif dalam kerangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat serta implikasinya langsung dirasakan oleh masyarakat. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang diharapkan mampu menanggulangi faktor risiko masalah kesehatan setempat, terus dikembangkan bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat dan unsur Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

## 1.2 Landasan Hukum

Dalam melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021 ini berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang menjadi landasan hukum, yakni :

1. Undang – undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) tentang hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan

- lingkungan yang baik dan sehat dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan ;
2. Undang – undang Nmor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
  3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
  4. Undang – undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  5. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;
  6. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
  8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2014 – 2019 ;
  9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
  10. Kepmenkes Nomor 32/MENKES/SK/I/2013 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 ;
  11. Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ;
  12. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 - 2019 ;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018 ;
  14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan Tahun 2005 - 2025;
  15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Perangkat Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021;

17. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kelola Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

## 1.3 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2020 ini adalah :

- a. Pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2020.
- b. Meningkatkan pengelolaan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2020 berdampak pada pencapaian target kinerja.
- c. Memberikan informasi tentang target kinerja yang akan dicapai tahun 2020.
- d. Alat kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja tahunan 2020.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Laporan ini terdiri dari 3 Bab, yaitu :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Arah Kebijakan
- BAB III : Komponen Rencana Kinerja Tahunan
- BAB IV : Penutup

## BAB II ARAH KEBIJAKAN

### 2.1 VISI

Kesehatan memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup, kecerdasan dan produktifitas sumber daya manusia. Sejalan kebijakan desentralisasi telah membawa dampak positif terhadap kemajuan Kota Balikpapan, namun demikian kecenderungan positif tersebut juga diikuti dengan kecenderungan yang menghawatirkan dimana terjadi berbagai hal sebagai ekse pembangunan.

Berbagai kecenderungan terkait dengan sektor kesehatan, dimana kecenderungan yang menghawatirkan diantaranya ancaman penyakit menular, meningkatnya penyakit tidak menular termasuk penyalahgunaan narkoba, permasalahan kesehatan lingkungan, ancaman penyakit dari lingkungan kerja dan kesehatan sanitasi makanan yang kurang baik. Namun demikian juga diikuti kecenderungan positif antara lain meningkatnya anggaran kesehatan pemerintah untuk masyarakat miskin dan penanggulangan masalah Millenium Development Goal's yang belum tercapai, meningkatnya peran masyarakat dan swasta, berkembangnya lembaga pelayanan kesehatan swasta, meningkatnya gerakan mutu pelayanan kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, penelitian dan studi banding sektor kesehatan.

Oleh karenanya sejalan dengan kecenderungan tersebut Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mengupayakan perubahan kearah perbaikan sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Balikpapan "Mewujudkan Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman " maka Dinas Kesehatan menetapkan Visi :

***TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPERILAKU SEHAT, MANDIRI,  
BERKEADILAN DAN BERKUALITAS***

yang mengacu pada RPJP Tahun 2005 – 2025 dan Rancangan Awal RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021. Pernyataan visi tersebut, mengandung 4 point yaitu sehat, mandiri, berkualitas dan berkeadilan.

**Sehat**, memberikan gambaran masyarakat Kota Balikpapan pada masa yang akan datang adalah masyarakat yang berhasil mencapai target pembangunan di bidang kesehatan yakni hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu serta memiliki status kesehatan yang setinggi – tingginya.

Makna visi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021 selaras dengan pengertian kesehatan menurut Undang – undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa sehat adalah keadaan sehat baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social maupun ekonomis. Hal tersebut bermakna dengan konsep sehat menurut Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*), yang menyatakan bahwa sehat adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental dan sosial yang terbebas dari suatu penyakit sehingga seseorang dapat dapat melakukan aktifitas secara optimal dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Mandiri**, masyarakat yang menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan.

**Berkualitas**, dimaksudkan sebagai upaya kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk mengurangi kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah, gender dan antar tingkat sosial ekonomi.

**Berkeadilan**, diperolehnya status kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya bagi setiap orang yang merupakan hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi.

Maka sejalan dengan visi tersebut , Dinas Kesehatan pada tahun 2016 – 2021 berkeinginan mewujudkan Gerakan Masyarakat dan Penerapan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) secara terpadu dan berkesinambungan, juga bertanggung jawab terhadap kesehatan individu, keluarga dan masyarakat, mendapatkan kemudahan akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mendapat layanan kesehatan yang bermutu

sesuai *Standart Operating Prosedure* (SOP) medis, Standar Pelayanan (SP) dan Standart Pelayanan Minimal (SPM).

## 2.2 MISI

Dalam rangka pencapaian visi tersebut ditetapkan Misi:

### 1. **Meningkatkan gerakan masyarakat dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara terpadu dan berkesinambungan.**

Upaya peningkatan derajat kesehatan melalui penerapan PHBS secara terpadu dan berkesinambungan baik secara lintas program maupun lintas sektor serta peran swasta dan peran serta masyarakat secara aktif agar PHBS menjadi budaya dan tertanam dalam kehidupan sehari-hari disetiapa tatanan PHBS yaitu rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, institusi kesehatan dan tempat-tempat umum. Penerapan PHBS untuk mewujudkan masyarakat sehat secara optimal merupakan tanggung jawab setiap insan.

### 2. **Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembiayaan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bidang kesehatan.**

Melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif penyelenggaraan kesehatan melalui penggerakan yang berwawasan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat agar hidup sehat, mendorong masyarakat agar mandiri untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat secara proaktif serta mewujudkan pemberdayaan masyarakat agar mandiri dan berperan serta secara aktif untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menggali potensi kearifan lokal yang dimiliki. Kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan insan kesehatan secara mutlak tetapi untuk terwujudnya masyarakat sehat merupakan tanggung jawab semua unsur baik masyarakat secara individu, keluarga, kelompok maupun pemerintah dan insan swasta lainnya. Penyelenggaraan upaya kesehatan mengutamakan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit didukung upaya pengobatan dan pemulihan kesehatan. Untuk dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga

dan masyarakat diperlukan lingkungan yang kondusif untuk terciptanya kemandirian dan peran serta masyarakat.

**3. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk seluruh masyarakat.**

Salah satu tanggung jawab Dinas Kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau untuk setiap individu, keluarga dan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau dimaksud diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta.

**4. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan pengendalian faktor risiko dampak pencemaran lingkungan**

Pembangunan berwawasan kesehatan mengandung makna bahwa setiap upaya pembangunan harus berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Upaya tersebut harus dapat menekan sekecil mungkin dampak negatif yang merugikan kesehatan masyarakat beserta lingkungannya, oleh karenanya untuk menciptakan kota sehat di Balikpapan perlu didukung adanya regulasi yang mengatur kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok. Sesungguhnya, keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan oleh peran serta segenap komponen masyarakat.

**5. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan yang berkualitas.**

Dalam pembangunan kesehatan, SDM Kesehatan merupakan salah satu isu utama yang mendapat perhatian terutama yang terkait dengan jumlah, jenis dan distribusi, selain itu juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam pengaturan SDM Kesehatan (PP No. 38 tahun 2000 dan PP No. 41 tahun 2000). Oleh karena itu, diperlukan penanganan lebih seksama yang didukung dengan regulasi yang memadai dan pengaturan insentif, *reward-punishment*, dan sistem pengembangan

karier. Kompetensi tenaga kesehatan belum terstandarisasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena saat ini baru ada satu standar kompetensi untuk dokter umum dan dokter gigi serta job deskripsi tenaga kesehatan lainnya belum jelas. Disamping itu penempatan dan pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Kesehatan Kota.

Adapun Agenda Prioritas dalam Rencana Strategis 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsep Puskesmas berdasar wilayah kerja Kelurahan, dengan mewujudkan pembangunan Puskesmas Graha Indah.
2. Melanjutkan realisasi relokasi Puskesmas Karang Jati dan Puskesmas Karang Rejo.
3. Pengembangan 7 Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara penuh dan 20 Puskesmas lainnya menuju BLUD bertahap.
4. Merealisasikan Peraturan Daerah (Perda) pelayanan kesehatan puskesmas, laboratorium kesehatan daerah, dan perizinan bidang kesehatan.
5. Merealisasikan Peraturan Daerah (Perda) Sistem Kesehatan Daerah Kota Balikpapan.
6. Merealisasikan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah sekaligus penerapan PPK – BLUD.
7. Mendukung Balikpapan sebagai kota sehat dengan mewujudkan realisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
8. Mengembangkan program hygiene sanitasi pasar menuju pasar sehat.
9. Peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.
10. Standarisasi kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.
11. Standarisasi dan kalibrasi peralatan kesehatan medis/non medis Puskesmas.
12. Akreditasi Layanan Kesehatan Primer (Puskesmas) se – Kota Balikpapan.

13. Akreditasi RS Milik Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta Kota Balikpapan
14. Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang KIBBLA.

## 2.3 TUJUAN DAN SASARAN

### 2.3.1 Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi maka tujuan yang akan dicapai adalah :

- a. Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
- b. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau, Merata dan Berkualitas
- c. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

### 2.3.2 Sasaran

Sasaran pembangunan kesehatan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati di atas adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
  - Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
  - Menurunnya angka kematian bayi
  - Menurunnya angka kematian neonatal
  - Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita
  - Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (stunting)
  - Meningkatnya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
- b. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
  - Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kesehatan sesuai Standar
  - Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Berkualitas
  - Terakreditasinya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer
  - Terakreditasinya Fasilitas Pelayanan Tingkat Rujukan/Lanjutan
- c. Menurunnya kasus kesakitan, kecacatan dan kematian
  - Menurunnya prevalensi Tuberculosis

- Menurunnya kasus Malaria (Annual Paracite Index – API)
  - Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa
  - Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0 – 11 bulan
  - Menurunnya angka kesakitan dan kematian DBD dan penyakit menular lainnya
  - Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Penyakit Tidak Menular
- d. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Promosi Kesehatan
- Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat
  - Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
  - Cakupan Kelurahan Siaga Aktif
  - Cakupan Posyandu Aktif
  - Cakupan UKBM aktif

## 2.4 KETERKAITAN SASARAN STRATEGIS, IKU, PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Sasaran Strategis	IKU	Target Tahun 2020	Program	Kegiatan
I	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Ibu	63/100.000 KH	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
		Angka Kematian Bayi	2/1.000 KH		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus
		Angka Kematian Balita	3/1.000 KH		Jaminan Persalinan Bagi Masyarakat yang Tidak Mempunyai Jaminan Persalinan (DAK 2020)
		Prevalensi Gizi Kurang dan Gizi Buruk	<3%	Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Gizi Masyarakat
				Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana Prasarana	Penyediaan Obat Gizi (DAK Penugasan 2020)

# RKT 2020

				<b>Kesehatan</b>	
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	80%	Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana Prasarana Kesehatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK 2020) Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Alat Kesehatan Pengadaan Obat dan BMHP (DAK 2020) Pengadaan Obat dan BMHP Pengembangan SIKDA Pengembangan Sistem Internal Pemerintah Rehab Berat/Sedang Sarana dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya Manajemen Desentralisasi Kesehatan Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Monev Puskesmas BLUD Pengadaan Alat Kesehatan (DAK 2020) Penyediaan Sewa Gedung Puskesmas
				Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI)
				Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya serta Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen di Bidang Obat dan Makanan

# RKT 2020

					Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
					Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di puskesmas Teritip
					Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di puskesmas Lamaru
					Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di puskesmas Manggar
					Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di puskesmas perawatan Sepinggian Baru
					Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di puskesmas Damai
					Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di puskesmas Gunung Bahagia
					Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di puskesmas perawatan Klandasan Ilir
					Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di puskesmas Prapatan

					Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di puskesmas Telaga Sari
					Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di puskesmas GSI
					Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di puskesmas perawatan Mekar Sari
					Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di puskesmas GSU
					Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di puskesmas Karang Jati
					Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di puskesmas Karang Rejo
					Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di puskesmas Gunung Samarinda
					Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di puskesmas Muara Rapak
					Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di puskesmas Batu Ampar
					Operasional Peningkatan Kesehatan

# RKT 2020

					Masyarakat di puskesmas Perawatan Karang Joang
					Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di puskesmas Margo Mulyo
					Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di puskesmas Baru Ilir
					Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di puskesmas Graha Indah
					Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di puskesmas Baru Tengah
					Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di puskesmas Margasari
					Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di puskesmas perawatan Baru Ulu
					Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di puskesmas perawatan Kariangau
					Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di puskesmas Sumber Rejo
					Operasional Peningkatan Kesehatan

# RKT 2020

					Masyarakat di puskesmas perawatan Manggar Baru
					Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
					Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
					Pembayaran Klaim Visum
					Kefarmasian BOK (DAK 2020)
					Pengawasan Obat dan Makanan (DAK 2020)
				Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggian Baru
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD

# RKT 2020

					Karang Joang
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Gunung Bahagia
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Ulu
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Manggar Baru
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Muara Rapak
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Ilir
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Teritip
					Peningkatan

# RKT 2020

					Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Batu Ampar
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Damai
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Manggar
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Gunung Samarinda
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Rejo
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
					Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
					Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
		Persentase RS yang Terakreditasi Nasional	80%	Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana Prasarana Kesehatan	Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan (DAK 2020)
		Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Nasional	85%		

# RKT 2020

		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	80%		Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	80%		Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
		Persentase Ketersediaan SDM Puskesmas	85%		Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan melalui Pengiriman Program Pelatihan
		Persentase Ketersediaan SDM RS	85%		
3	Menurunnya Kasus Kesakitan, Kecacatan dan Kematian	Persentase Angka Kesakitan	98,30%	Upaya Kesehatan Masyarakat	<p>Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia</p> <p>Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan PTM (Penyakit Tidak Menular)</p> <p>Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan PTM (Penyakit Tidak Menular) DAK 2020</p> <p>Pelayanan Kesehatan Jiwa untuk Masyarakat</p> <p>Pelayanan Kesehatan Jiwa untuk Masyarakat (DAK 2020)</p>
		Prevalensi TBC	135/100.000 penduduk	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	<p>Peningkatan Imunisasi</p> <p>Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TBC, ISPA, Kecacingan dan Diare dan Kusta)</p> <p>Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TBC, ISPA, Kecacingan dan Diare dan Kusta)</p>

# RKT 2020

					DAK 2020
					Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TBC, ISPA, Kecacingan dan Diare dan Kusta) DAK
					PENUGASAN 2020
					Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
					Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah (DAK 2020)
		Prevalensi HIV dan AIDS	<1		Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS , HIV/AIDS
					Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS , HIV/AIDS (DAK 2020)
		Angka Kejadian DBD per 100.000 penduduk	275/100.000 penduduk		Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis
					Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis (DAK 2020)
		Persentase Angka Kesakitan	98,30%	Upaya Kesehatan Masyarakat	Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA
					Operasional KDRT, KTP, KTA dan Trafficking
					Penanggulangan KLB dan Bencana
					Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan
					Pelayanan Kesehatan Mata

# RKT 2020

					untuk Masyarakat
					Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji
					Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
					Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari
					Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo
					Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati
					Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo
					Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margasari
					Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Graha Indah
					Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu
					Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana

# RKT 2020

					Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir
					Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
					Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir
					Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu
					Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo
					Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Promosi Kesehatan	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	100%	Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Cakupan UKBM Aktif	65%		Penyehatan Lingkungan
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan (BOK) DAK 2020
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip (BOK) DAK 2020

# RKT 2020

						Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru (BOK) DAK 2020
						Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar (BOK) DAK 2020
						Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar Baru (BOK) DAK 2020
						Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sepinggian Baru (BOK) DAK 2020
						Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia (BOK) DAK 2020
						Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai (BOK) DAK 2020
						Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Klandasan Ilir (BOK) DAK 2020
						Peningkatan Pelayanan

# RKT 2020

					Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari (BOK) DAK 2020
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan (BOK) DAK 2020
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu (BOK) DAK 2020
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir (BOK) DAK 2020
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mekar Sari (BOK) DAK 2020
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo (BOK) DAK 2020
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati (BOK) DAK 2020
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan

# RKT 2020

					Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo (BOK) DAK 2020
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar (BOK) DAK 2020
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo (BOK) DAK 2020
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Graha Indah (BOK) DAK 2020
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak (BOK) DAK 2020
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir (BOK) DAK 2020
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah (BOK) DAK 2020
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ulu (BOK) DAK 2020
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan

# RKT 2020

					Masyarakat di Puskesmas Margasari (BOK) DAK 2020
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Joang (BOK) DAK 2020
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kariangau (BOK) DAK 2020
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda (BOK) DAK 2020
					Pengadaan Sanitarian Kit (DAK 2020)
					Dukungan Manajemen BOK Kota dan Jampersal – DAK 2020
					Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG</b>				
<b>1</b>	Meningkatnya Tatalaksana Pengelolaan Administrasi Pelayanan Publik	Lancarnya Tugas OPD	100%	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan

					Barang Cetak dan Penggandaan
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Makanan dan Minuman
					Rapat – Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah
					Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Evaluasi RENJA dan RENSTRA
				Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

## 2.5 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### 2.5.1 Strategi

Berkaitan dengan isu strategis pada Bab III, maka perlu ditetapkan strategi dan kebijakan dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats). Analisis SWOT merupakan metode untuk menentukan perencanaan strategi. Dengan mengidentifikasi beberapa aspek, internal (Strengths/Kekuatan dan Weakness/Kelemahan) dan eksternal (Opportunities/Peluang dan Threats/Ancaman), maka akan dihasilkan 4 strategi utama, yakni :

- SO yaitu menggunakan kekuatan internal untuk mengambil peluang yang ada di luar

# RKT 2020

- WO yaitu menggunakan peluang eksternal yang ada untuk memaksimalkan kecepatan yang ada
- ST yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari ancaman yang ada di luar
- WT yaitu meminimalkan kelemahan dan ancaman yang mungkin ada

Faktor Internal	Strength	Weakness
<b>Faktor Eksternal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan Pemerintah Daerah</li> <li>2. Dukungan Anggaran Kesehatan</li> <li>3. Regulasi yang kuat tentang Struktur Organisasi</li> <li>4. Akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau</li> <li>5. Motivasi dan semangat Pegawai yang tinggi</li> <li>6. Dukungan SDM Kesehatan dari Institusi Pendidikan Kesehatan</li> <li>7. Akreditasi pada fasilitas layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit)</li> <li>8. Peran serta dan kemitraan yang sudah terjalin dengan baik</li> <li>9. Standar Operasional Prosedur</li> <li>10. Standar Pelayanan</li> <li>11. Standar Pelayanan Minimal</li> <li>12. Kewenangan untuk melakukan fasilitas bidang Kesehatan</li> <li>13. Tingkat pendidikan tenaga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendukung operasional belumseluruhnya memadai/mencukupi</li> <li>2. Distribusi SDM Kesehatan belum merata</li> <li>3. Jumlah dan jenis tenagakesehatanbelum memenuhstandar pelayanan fasilitas kesehatan(Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014)</li> <li>4. Dukungan regulasi yang terkaitkesehatan belum berjalan secara maksimal</li> <li>5. Kualitas dan mutu pelayanankesehatan belum berjalansecaraoptimal</li> <li>6. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan belum maksimal</li> <li>7. Sistem Informasi Kesehatanbelum berjalan maksimal</li> <li>8. Keterampilan SDM Kesehatanyang belum</li> </ol>

# RKT 2020

	<p>kesehatan cukup memadai</p> <p>14. Jumlah sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik milik pemerintah maupun swasta cukup memadai</p> <p>15. Sistem Informasi Kesehatan berjenjang berbasis teknologi informasi dari Puskesmas, Dinas Kesehatan sampai ke tingkat Pusat</p> <p>16. Kebijakan program tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat terintegrasi dengan BPJS</p>	<p>sepenuhnya memadai</p> <p>9. Beban tugas rangkap di luar tugas pokok dan fungsi</p> <p>10. Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal belumlah berjalan optimal</p>
Opportunity	Strategi SO	Strategi WO
<p>1. Pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>2. Fasilitas pelayanan Kesehatan tersebar dan berkembang pesat</p> <p>3. Dukungan Stakeholder terhadap program Kesehatan</p> <p>4. Adanya komitmen global dalam pencapaian tujuan SDG's</p> <p>5. Kebutuhan</p>	<p>1. Memanfaatkan dukungan pemerintah melalui regulasi yang ada untuk menjalin kerjasama dengan kemitraan pihak lain melalui pendanaan bidang terkait pembangunan kesehatan (CSR)</p> <p>2. Memanfaatkan dukungan anggaran dan sarana prasarana yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat</p> <p>3. Memanfaatkan motivasi dan semangat pegawai, kemudahan akses layanan</p>	<p>1. Memanfaatkan dukungan stakeholder untuk memaksimalkan pemenuhan sarana prasarana penunjang pelayanan dan pemenuhan tenaga khusus dengan kompetensi tertentu</p> <p>2. Memanfaatkan regulasi kesehatan yang sudah berjalan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan</p> <p>3. Memaksimalkan dukungan stakeholder dan CSR dalam memenuhi sarana dan prasarana penunjang</p>

# RKT 2020

<p>masyarakat yang tinggi akan Pelayanan kesehatan yang Berkualitas</p> <p>6. Regulasi kesehatan yang sudah ada berjalan baik</p> <p>7. Dukungan dana kesehatan melalui CSR</p>	<p>untuk menjamin mutu layanan kesehatan guna mengantisipasi semakin berkembangnya fasilitas pelayanan kesehatan non pemerintah yang tersebar</p> <p>4. Memanfaatkan dukungan pemerintah, stakeholder dan lintas sector dalam mendukung komitmen global pencapaian SDG's dan Memaksimalkan implementasi regulasi kesehatan yang ada</p>	<p>pelayanan kesehatanyang belum optimal</p> <p>4. Memaksimalkan kondisigeografisdan fasilitas pelayanan kesehatanyang tersebar untukmengembangkan SIK (SistemInformasi Kesehatan)</p> <p>5. Optimalisasi regulasi yang adauntukmemaksimalkan tugaspokok dan fungsi di lingkunganOPD DinasKesehatan KotaBalikpapan</p>
Threat	Strategi ST	Strategi WT
<p>1. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi</p> <p>2. Re-emerging dan new emerging disease dan daerah endemis penyakit yang terus berkembang</p> <p>3. Peran serta masyarakat dalam penerapan PHBS belum maksimal</p> <p>4. Karakteristik penduduk yang heterogen</p>	<p>1. Memaksimalkan regulasi yang mengatur struktur organisasi untuk mengantisipasi mobilitas penduduk yang cukup tinggi</p> <p>2. Memanfaatkan motivasi dan semangat pegawai serta kemudahan akses layanan dalam mengatasi beban ganda penyakit baik new emerging disease maupun re – emerging disease</p> <p>3. Memanfaatkan dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk mengatasi beban ganda penyakit serta mendorong peran serta</p>	<p>1. Meningkatkan pendukung operasional kesehatan dalammeningkatkan peran sertamasyarakat untuk penerapanPHBS</p> <p>2. Meningkatkan kompetensiSDMKesehatan, pemenuhantenagakhusus serta kualitas dan mutupelayanan kesehatan untukmengatasi beban ganda penyakit</p> <p>3. Meningkatkan kualitas mutupelayanan kesehatan danpemenuhan sarana prasaranapenunjang pelayanan kesehatanuntuk</p>

<p>5. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi baik alami maupun migrasi serta tingginya Mobilitas penduduk</p> <p>6. Kondisi geografis dengan area rawan bencana</p> <p>7. Angka kekerasan terhadap anak mulai meningkat</p> <p>8. Peredaran Napza Menduduki peringkat ke – 2 di Kalimantan Timur</p>	<p>masyarakat dalam penerapan PHBS secara maksimal</p> <p>4. Memaksimalkan dukungan institusi pendidikan kesehatan, lintas sector dan swasta dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk memaksimalkan penerapan PHBS</p> <p>5. Memanfaatkan dukungan pemerintah daerah dengan penerapan konsep Bersinar dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</p>	<p>menghadapi mobilitas penduduk yang tinggi</p> <p>4. Optimalisasi Sistem Informasi Kesehatan dalam mendukung penanganan beban ganda penyakit</p>
---	---	--

Dinas Kesehatan sebagai unit kerja Pemerintah Kota Balikpapan memiliki arah kebijakan pembangunan kesehatan untuk mencapai visi dan misi dalam upaya mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang – peluang yang ada, mengatasi berbagai kelemahan dan meminimalkan faktor – faktor yang mengancam. Beberapa strategi yang dihasilkan :

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus kehidupan
2. Meningkatnya status gizi masyarakat melalui program 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan dan Penanganan Kasus Gizi Lebih
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan serta berbasis evidence based dengan mengutamakan kegiatan promotif – preventif, kuratif dan rehabilitatif

4. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yang merata dan bermutu
5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kebermanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan
6. Respon terhadap isu, alert, dan kejadian kesehatan di masyarakat
7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat mandiri dalam pembangunan kesehatan dan promosi kesehatan
8. Mengaktifkan kelurahan siaga dan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)

## 2.5.2 Kebijakan

Untuk melaksanakan strategi tersebut diperlukan arah kebijakan pembangunan yang meliputi :

1. Menjalankan ANC berkualitas dan optimalisasi sistem rujukan maternal perinatal
2. Mengembangkan pelayanan kesehatan anak dan remaja melalui UKS
3. Menjalankan upaya kesehatan kerja pada usia produktif
4. Meningkatkan upaya kesehatan lansia
5. Meningkatkan pelayanan gizi melalui 1000 HPK dan penanganan kasus gizi lebih
6. Mengimplementasikan Perda KIBBLA
7. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya dengan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD)
8. Mendorong Puskesmas dan Fasilitas Layanan Primer dan Rumah Sakit untuk pemenuhan syarat terakreditasi
9. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional maupun struktural
10. Mengembangkan pelayanan dan penyediaan obat, makanan serta melindungi masyarakat dari bahan – bahan berbahaya
11. Penguatan sistem kewaspadaan dini pada setiap jenjang administrasi

12. Mengaktifkan kelurahan siaga dan UKBM
13. Penguatan regulasi dan perijinan bidang, perda retribusi pelayanan bidang kesehatan, perda KSTR (Kawasan Sehat Tanpa Rokok) dan SKD (Sistem Kesehatan Daerah)
14. Pengembangan sistem informasi kesehatan yang berbasis web yang dapat diakses seluruh stakeholder

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan didasarkan pada kebijakan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 setelah memperhatikan permasalahan kesehatan melalui hasil review pelaksanaan pembangunan kesehatan sebelumnya yang diarahkan pada upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta mendorong percepatan pencapaian SDG's yang dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah, gender, dan antar tingkat sosial ekonomi, melalui: (a) pemihakan kebijakan yang lebih membantu kelompok miskin dan daerah yang tertinggal; (b) pengalokasian sumberdaya yang lebih memihak kepada kelompok miskin dan daerah yang tertinggal; (c) pengembangan instrumen untuk memonitor kesenjangan antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi; dan (d) peningkatan advokasi dan *capacity building* bagi daerah yang tertinggal. Disamping itu juga meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

Sejalan kebijakan nasional, kebijakan pembangunan kesehatan Provinsi Kalimantan Timur 2013 - 2018 diarahkan pada :

1. Memfasilitasi peningkatan cakupan dan mutu pelayanan rumah sakit, puskesmas serta fasilitas (sarana dan prasarana) pelayanan kesehatan lainnya dan mengembangkan jaringan pelayanan yang terintegrasi ;
2. Memfasilitasi penyediaan pelayanan puskesmas 24 jam yang lengkap dengan ruangrawat inap dan unit gawat darurat (UGD) mencakup penyediaan sarana danprasarananya ;
3. Mendorong Puskesmas sebagai Layanan Primer untuk pemenuhan syarat terakreditasi ;

4. Mengembangkan manajemen mutu di unit pelaksana teknis yang mendorong peningkatan pelayanan prima ;
5. Mengembangkan regulasi yang mendorong terlaksananya pelayanan kesehatan berkualitas secara merata ;
6. Peningkatan upaya-upaya pencegahan penyakit melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat (imunisasi, kesehatan jiwa, kesehatan olah raga, kesehatan kerja), peningkatan kesiap siagaan kegawat daruratan dan bencana serta penanggulangan kejadian luar biasa/wabah dan peningkatan sistem surveilan epidemiologi berbasis masyarakat dan fasilitas kesehatan ;
7. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi lingkungan perumahan dan tempat-tempat umum lainnya ;
8. Peningkatan pencapaian derajat kesehatan melalui promosi cara hidup sehat dan membangun kemitraan untuk mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat (Usaha Kesehatan Sekolah, Swasta, Pos Kesehatan Pesantren, Polindes dan Pos Kesehatan Desa) ;
9. Pemberdayaan perempuan dan keluarga untuk berperan serta aktif dalam meningkatkan mutu kesehatan dan gizi keluarga ;
10. Memenuhi kebutuhan, meningkatkan mutu profesionalisme tenaga kesehatan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;
11. Peningkatan dan pemerataan tenaga medis dan para medis di setiap kabupaten/kota sampai pedalaman/daerah terpencil dan perbatasan ;
12. Mengembangkan sistem pembiayaan dan fasilitasi penyediaan bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin yang berbasis sistem pra upaya/asuransi/Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ;
13. Mengembangkan pelayanan dan penyediaan obat, makanan serta melindungi masyarakat dari bahan-bahan berbahaya ;
14. Penyelenggaraan aparatur yang bersih berwibawa dengan peningkatan pelayanan prima melalui penerapan sistem manajemen mutu dan penanganan pengaduan masyarakat ;

15. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan lingkungan kerja aparatur yang berdaya saing tinggi.

## BAB III

### KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

#### 3.1 SASARAN STRATEGI

- 3.1.1 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
- 3.1.2 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
- 3.1.3 Menurunnya Kasus Kesakitan, Kecacatan dan Kematian
- 3.1.4 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Promosi Kesehatan

#### 3.2 INDIKATOR KINERJA

- 3.2.1 Angka Kematian Ibu
- 3.2.2 Angka Kematian Bayi
- 3.2.3 Angka Kematian Balita
- 3.2.4 Prevalensi Gizi Kurang dan Gizi buruk
- 3.2.5 Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Nasional
- 3.2.6 Persentase RS yang Terakreditasi Nasional
- 3.2.7 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
- 3.2.8 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- 3.2.9 Persentase Ketersediaan SDM Puskesmas
- 3.2.10 Persentase Ketersediaan SDM RS
- 3.2.11 Persentase Angka Kesakitan
- 3.2.12 Prevalensi HIV dan AIDS
- 3.2.13 Angka Kejadian DBD per 100.000 penduduk
- 3.2.14 Prevalensi TBC
- 3.2.15 Cakupan Kelurahan Siaga Aktif
- 3.2.16 Cakupan UKBM Aktif

## BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2020 merupakan suatu bagian dokumen dari syarat penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana turunan dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun. Melalui Rencana Kinerja Tahunan ini akan memberikan gambaran lebih rinci mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun sebagai wujud pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator – indikator kinerja dari kegiatan berupa output dan indikator program berupa outcome ditentukan dalam dokumen ini, sehingga diharapkan dapat lebih terukur capaian kerjanya.

Tentunya keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2020 ini terletak sepenuhnya pada kemampuan sumber daya yang ada dalam menciptakan sinergisme dan integrasi pelaksana pembangunan bidang kesehatan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar unit dalam lingkup Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.



DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

2019